

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA SEKTOR PANTAI
(STUDI PADA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
BLITAR, PERUM PERHUTANI KABUPATEN BLITAR, DAN PEMERINTAH DESA SERANG
KABUPATEN BLITAR)**

Kurnia Alvin Syahputra

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: kurniaalvinsyahputra@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email : muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Pariwisata dapat menyediakan pertumbuhan ekonomi dalam hal membuka peluang kerja, pendapatan, taraf hidup, dan bisa mengaktifkan sektor perekonomian suatu daerah. Adanya pengelolaan dengan cara peningkatan fasilitas seperti sarana dan prasarana, SDM yang profesional dapat menciptakan daya tarik untuk kegiatan pariwisata. melalui RPJMD Kabupaten Blitar melakukan pengembangan destinasi wisata pantai menemui suatu kendala dalam kewenangan lahan yang berada di tepian pantai serang, lahan tersebut merupakan wilayah kerja dari Perum Perhutani sehingga pemerintah tidak bisa mengakses secara maksimal. Terjadinya tumpang tindih dalam pengelolaan tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya untuk melakukan sebuah sinergitas dalam pengelolaan destinasi wisata pantai serang. Sehingga dilakukannya *collaborative governance* oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Desa untuk melakukan pengelolaan dengan maksimal. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata pantai Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan proses *collaborative governance* dari More and Stephens (2012) yang terdiri dari *assasment, inimitation, delebration, implementation*. Hasil penelitian menunjukkan kolaborasi yang dilakukan *assasment* dengan melihat kondisi awal terjadi tumpang tindih antar pemangku kepetingan sehingga menghambat proses pengelolaan. *Inimitation* diprakarsai oleh pemerintah kabupaten bertujuan untuk mengurai permasalahan yang telah terjadi. *Delebration* dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama, hak dan kewajiban, peran *stakeholders* dalam menjalin kerjasama. *Implementation* terjadi sebuah perubahan pada lokasi wisata dari fasilitas, jasa usaha, kemampuan SDM serta *stakeholders* yang memahami peran serta tupoksinya masing masing.

Kata Kunci: *Collaborative governance*, pariwisata.

Abstract

Tourism can provide economic growth in terms of opening employment opportunities, income, living standards, and can activate the economic sector of a region. The existence of management by increasing facilities such as facilities and infrastructure, professional human resources can create attraction for tourism activities. through the Blitar Regency RPJMD, the development of coastal tourism destinations encountered an obstacle in the authority of land located on the edge of Serang beach, the land is a working area of the Perhutani Public Corporation so that the government cannot access it optimally. The overlap in the management of the Blitar Regency Government seeks to establish a synergy in the management of the Serang beach tourism destination. So that collaborative governance is carried out by the Blitar District Government with Perum Perhutani and the Village Government to carry out maximum management. The purpose of this study is to describe collaborative governance in the management of Serang beach tourism, Panggungrejo District, Blitar Regency. This research uses descriptive type with a qualitative approach. The focus of this study uses a collaborative governance process from More and Stephens (2012) which consists of assessment, inimitation, delebration, implementation. The results showed collaboration conducted by the assessment by looking at the initial conditions of overlapping between stakeholders that hampered the management process. Inimitation initiated by the district government aims to unravel the problems that have occurred. Delebration is done to achieve mutual understanding, rights and obligations, the role of stakeholders in establishing cooperation. Implementation occurs a change in the tourist location of the facilities, business services, ability of human resources and stakeholders who understand the role and function of each.

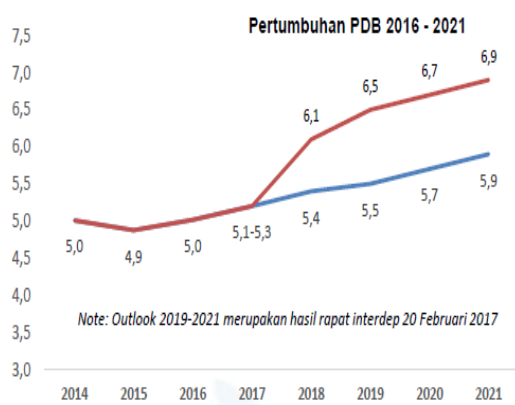
Keywords: Collaborative governance, tourism.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai keindahan alam begitu banyak. Flora dan fauna serta budaya yang beraneka ragam menjadikan keunikan tersendiri. Menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki begitu besar, hal tersebut mempengaruhi keberagaman pariwisata yang ada di Indonesia. Secara umum, pariwisata dipandang sebagai sektor yang dapat mendorong serta meningkatkan kegiatan pembangunan, membuka usaha baru, membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat maupun pendapatan asli daerah, apabila pengelolaannya dilakukan secara maksimal. Pariwisata ialah sebuah aktivitas manusia yang dilakukan dengan secara sadar dan mendapat suatu pelayanan secara bergantian di antara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri maupun di luar negeri, mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima (Wahab dalam Nasrul (2010:3)).

Berdasarkan laporan *The Travel & Tourism Competitiveness Report*, peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di dunia naik menjadi peringkat 40 di tahun 2019 dari peringkat 42 di tahun 2017, yang dirilis WEF (World Economic Forum) 2019. Pada tahun 2015 tercatat pariwisata menyumbang 12,2 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Kemudian, tahun 2016 naik menjadi 13,6 miliar dollar AS dan tahun 2017 menjadi 15 miliar dollar AS. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 15,81 juta wisatawan. Bila dibandingkan tahun 2017, kunjungan wisatawan manca negara naik 12,58 persen (Dikutip dari laporan *World Economic Forum* 2019). Sehingga diperoleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah ini :

Grafik 1 :
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)



Sumber : *World Economic Forum* 2019

Ringkasan data tersebut menunjukkan adanya peningkatan wisatawan yang berkunjung pada destinasi wisata, sehingga menghasilkan hal positif salah satunya Produk Domestik Bruto (PDB). Selanjutnya Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menjelaskan bahwa pariwisata ialah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Untuk menunjang kelancaran pengembangan pariwisata diperlukan beberapa pendorong yang penting seperti jalan yang baik, transportasi darat, laut, udara, dan akomodasi. Dalam upaya pengembangan suatu destinasi pariwisata banyak hal yang dapat dilakukan. Salah satunya dengan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Tentunya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sehingga terciptanya suatu hubungan yang sehat dan berdampak baik dalam pengembangan sektor pariwisata.

Pada tahun 2016 Pemerintah Jawa Timur Dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di Jawa Timur, pemerintah bersama PT. Angkasa Pura I (Persero) menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion (FGD) Collaborative Destination Development (CDD)* dengan tema “*Development East Java’s Tourism Welcome one milion foreign tourist arrival by 2025*”. Bersama pemangku kepentingan pariwisata. *Collaborative Destination Development (CDD)* merupakan forum kolaborasi berbagai pemangku kepentingan industri pariwisata nasional dan daerah agar bersama-sama mengembangkan sektor pariwisata dan melaksanakan pelayanan pariwisata. *CDD* di Jawa Timur, disepakati pengembangan destinasi wisata Jawa Timur melalui perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan, peningkatan sinergitas usaha angkutan udara atau maskapai dengan asosiasi agen perjalanan wisata dengan menawarkan berbagai promo dan paket menarik agar dapat menjaring lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara.

Secara garis besar *Collaborative Governance* muncul dengan sengaja diciptakan secara sadar guna melancarkan permasalahan yang sedang menghambat suatu pekerjaan. *Collaborative governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai instansi dalam mencapai tujuan bersama. Penjelasan tidak dijabarkan terperinci jenis organisasi apa saja tergabung dalam praktek tersebut. Kerjasama antar organisasi hanya terlihat tujuan telah disepakati secara bersama dengan pengaktualisasian kapasitas masing-masing pihak (Cordery, Hartman et al dlm Mah & Hills (2012:89)).

Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kewenangan lebih luas pada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Membawa implikasi semakin besarnya tanggung jawab dan tuntutan untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka menopang perjalanan pembangunan di daerah. Pemerintah dan *stakeholder* kepariwisataan menyadari, besarnya potensi kepariwisataan di daerah sehingga berusaha menggali, mengembangkan serta membangun aset obyek dan daya tarik wisata yang merupakan modal awal untuk bangkitnya kegiatan pariwisata.

Sejalan dengan peluang tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Jawa Timur tahun 2017– 2032. Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sektor pariwisata sangatlah berperan penting, menyediakan infrastruktur, memperluas jaringan, kegiatan kordinasi aparatur pemerintahan pihak swasta, melakukan promosi ke daerah lain. Berikut gambar perbandingan kinerja Jatim dalam kontribusi sektor pariwisata :

Gambar 1 :
Perbandingan Realiasi Kinerja Jawa Timur dengan Provinsi Lain

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA JATIM DENGAN PROVINSI LAIN				
NO.	PROVINSI	WISMAN 2017	WISNUS 2017	PDB/PDRB ADHB / kontribusi sektor pariwisata 2017 (Rupiah)
1.	Nasional	13,7 Juta	277 Juta	5%
2.	Jawa Timur	625.729	58.649.178	117.428 T 5,82% thd PDRB Jatim
3.	Jawa Tengah	718.148	37.796.086	1.187 T 3,2% thd PDRB Jateng
4.	Jawa Barat	1,5 Juta	50 Juta	43.001 T 2,5 % thd PDRB Jabar

- Kontribusi Wisman Jatim thd Nasional **4,57%**
- Kontribusi Wisnus Jatim thd Nasional **21,17%**
- Kontribusi PDRB Jatim sektor Pariwisata thd PDB sektor Pariwisata Nasional **17,28%**

Sumber : Disbudpar Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2017 wisatawan Jawa Timur berjumlah 625.729 sedangkan wisatawan nusantara berjumlah 58.649.178. Dimana kontribusi wisata mancanegara Jawa Timur terhadap Nasional adalah 4,57%, kontribusi wisatawan nusantara Jawa Timur terhadap Nasional adalah 21,17%.

Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi perkembangan wisata yang menjanjikan adalah Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna

tanah terinci sebagai sawah, pekarangan, perkebunan, tambak, tegal, hutan, kolam ikan dan lain-lain. Kabupaten Blitar juga di belah oleh aliran sungai Brantas menjadi dua bagian, sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. (Badan Statistik Kab. Blitar. 2018)

Daya Tarik serta potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adi luhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi usaha yang kondusif telah diciptakan dapat menjadi *point of essential* terutama jaminan untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar. Potensi yang dimiliki dapat menunjang pembangunan berbagai sektor, khususnya pariwisata sehingga perkembangan pembangunan di Kabupaten Blitar dapat maksimal. Adapun Daftar Destinasi Wisata di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 1 :

Daftar Destinasi Wisata Di Kabupaten Blitar

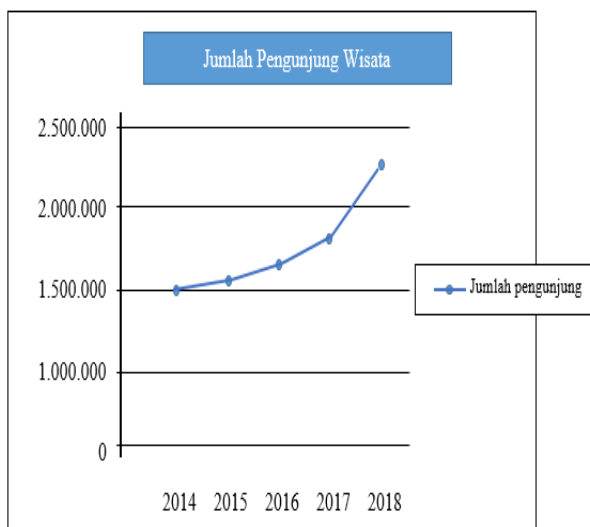
Jenis Wisata	Nama Wisata	Alamat
Wisata Alam	Pantai Tambak Rejo	Kec. Wonotirto
	Pantai Gondo Mayit	Kec. Wonotirto
	Pantai Jolosutro Blitar	Kec. Wates
	Pantai Pangi	Kec. Bakung
	Pantai Serang Blitar	Kec. Panggungrejo
	Pantai Peh Pulo	Kec. Panggungrejo
	Petilasan Rambut Monte	Kec. Gandusari
	Kebun Teh Sirah Kencong	Kec. Gandusari
	Pendakian Gunung Kelud	Kec. Gandusari
Wisata Sejarah	Candi Penataran	Kec. Nglegok
	Candi Gambar Wetan	Kec. Nglegok
	Candi Kotes	Kec. Gandusari
	Candi Sawentar	Kec. Kanigoro
	Arca Gaprang	Kec. Kanigoro
	Canding Simping	Kec. Kademangan
Wisata menarik lainnya	Wisata Gong Kyai Pradah	Kec. Sutojayan
	Pemandian Penataran	Kec. Nglegok
	Bendungan Wlingi Raya	Kec. Talun
	Bendungan Nyuyur	Kec. Gandusari
	Kampung Coklat	Kec. Kademangan
	Kebun Kopi Karanganyar	Kec. Nglegok
Bukit Bunda	Kec. Kademangan	

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Blitar tahun 2018

Terdapat beberapa destinasi yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar. Dari uraian data di atas pariwisata di Kabupaten Blitar terbagi menjadi tiga jenis wisata.

Wisata alam, wisata sejarah dan wisata buatan. Dimana setiap destinasi mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri untuk di kembangkan, sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mau berkunjung. Berikut peningkatan pengunjung yang terjadi pada tahun 2014-2018 di Kabupaten Blitar yang di tunjukan pada grafik dibawah ini :

Grafik 2 :
Kunjungan Wisata Kabupaten Blitar tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar

Pada tahun 2018, laporan dari Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata (Disporbudpar) Kabupaten Blitar menunjukkan terjadinya kenaikan jumlah kunjungan wisata pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Peningkatan derastis pada tahun terakhir dari 1.727.953 kunjungan di tahun 2017 menjadi 2.308.926 kunjungan di tahun 2018. Angka ini menjadi salah satu bukti kemajuan dalam pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Blitar. Dengan demikian harus juga ada peningkatan kualitas pelayanan serta pengelolaan sektor pariwisata tersebut.

Dalam mengakselerasi pengembangan pariwisata maka dibutuhkan strategi pengembangan kepariwisataan. Sesuai RPJMD kabupaten Blitar tahun 2016-2021 dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016, Strategi yang pertama adalah pengembangan produk wisata meliputi objek dan daya tarik wisata, atraksi wisata, amenitas (akomodasi, restoran atau rumah makan), dan aksesibilitas. Strategi yang kedua adalah pengembangan prasarana meliputi penyediaan jaringan jalan, air bersih, listrik, telepon dan lainnya. Strategi yang ketiga pengembangan usaha atau investasi. Sesuai *master plan* yang telah disusun, maka pengembangan pariwisata akan difokuskan pada pembangunan pariwisata Candi Penataran, Perkebunan Serah Kencong dan Pantai Serang yang disebut dengan *Three angle diamond*

Kabupaten Blitar. Oleh karena itu pantai Serang merupakan salah satu fokus dari pembangunan Kabupaten Blitar.

Pantai Serang merupakan lokasi pantai yang mempunyai daya tarik lebih banyak dan diminati oleh wisatawan, lokasi pantai yang cukup dekat dari pusat pemerintahan dapat di tempuh kurang lebih satu jam dibandingkan pantai Jolosutro dan pantai Tambakrejo yang lebih jauh. Terdapat kegiatan budaya yang terdapat di pantai serang dapat menjadikan pengunjung antusias untuk melihat dan berkunjung di pantai serang, seperti upacara adat yang dilakukan setiap bulan suro yang menarik wisatawan lebih banyak lagi. Pantai Serang merupakan pantai yang mempunyai penangkaran penyu di Kabupaten Blitar yang akan menambah ciri khas dari pantai Serang sendiri.

Pengembangan pada RPJMD yang memfokuskan kawasan pantai tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar menemui beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan pantai Serang tersebut. Dimana lokasi pantai Serang Kecamatan Panggungrejo merupakan kawasan yang masih bagian dari kewenangan Perum Perhutani, bersamaan dengan pantai Jolosutro di Kecamatan Wates dan pantai Tambakrejo di Kecamatan Wonotirto. Hal tersebut membuat pemerintah tidak mampu menjangkau secara maksimal guna pengelolaan lebih lanjut. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada proses pengembangan wilayah guna menambah lahan dalam pengelolaan pantai.

Masyarakat juga perlu adanya bimbingan dan promosi yang tepat terhadap wisata pantai agar menunjang perkembangan pariwisata. Pelatihan serta pembinaan terhadap masyarakat perisir guna sadar wisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar masih belum mendapat respon yang baik dari masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih seringnya melanggar aturan- aturan yang dilarang oleh pemerintah tentang sadar lingkungan. Peran masyarakat diharapkan mempunyai andil yang sangat besar dalam proses ini. Untuk itu masyarakat ditempatkan pada posisi memiliki, mengelola, merencanakan dan memutuskan tentang program yang melibatkan kesejahteraannya (Korten dalam Kusmayadi dan Ervina, 1999).

Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi. Pemerintah Kabupaten Blitar berinisiasi melakukan *Collaborative Governance* dengan pihak-pihak terkait. Dengan permasalahan yang sedang dihadapi, menjalin sinergi dengan berkolaborasi dengan Perum Pehutani selaku kewenangan wilayah dan Pemerintah Desa sebagai pelaku wisata diharapkan akan mengurai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan kawasan pantai yang tertuang dalam RPMJD. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam sebuah kesepakatan kerjasama (MoU)

antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Blitar tentang pengembangan potensi wisata Nomor: 109/KB/BLTDivre Jatim/2016, Nomor: 119/1.002/4098.011/2016, yang menjadi bukti sinergitas Pemkab Blitar dalam pengelolaan wisata sektor pantai ini. MoU kerjasama ini merupakan langkah untuk mengembangkan pariwisata di pantai Kabupaten Blitar. Saling menguntungkan dan menghargai. Pembuatan dokumen perjanjian kerjasama agar peran dan tanggung jawab ketiga pihak yang bekerjasama dapat diketahui dengan jelas (Elvirandini dan Ma'ruf, 2018:1).

Kerjasama dalam proses pengembangan infrastruktur pantai, fasilitas seperti lahan parkir, penataan serta penambahan warung-warung dan pertokoan akan menambah kenyamanan serta antusiasme para wisatawan. Keterbatasan lahan parkir belum bisa manampung kendaraan wisatawan pada hari libur, selain itu ada beberapa masyarakat yang mendirikan warung di tepian pantai, sehingga dapat membahayakan masyarakat ketika air laut sedang pasang dan juga dapat merusak ekosistem wilayah bibir pantai. Dengan kolaborasi tersebut terjadi perluasan lahan parkir serta penataan ulang warung sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan para wisatawan maupun masyarakat itu sendiri.

Peran pihak *non government organisation* (NGO) maupun masyarakat yang tegabung dalam kelompok sadar wisata bisa memperluas jaringan terhadap wisata yang ada di pantai serang. Seperti yang kita ketahui bahwasanya NGO mempunyai strategi dalam promosi maupun variasi pelayanan dalam mengemas destinasi wisata agar menarik pasar yang luas yang belum dimiliki oleh pemerintah. Platform digital seperti penyedia tour wisata, jasa transportasi, paket wisata, akan memiliki strategi yang lebih baik sesuai dengan kapasitasnya sehingga menambah daya tarik kunjungan terhadap destinasi wisata tersebut. Dengan dibantu oleh kelompok sadar wisata atau pokdarwis pemerintah desa serang dapat mengelola destinasi dengan maksimal. *Upgrading Sumber Daya Manusia (SDM)* yang terdapat pada pengelola sangatlah diperlukan guna mengaktifkan kekreatifitasan dalam menyediakan pelayanan terhadap para pengunjung di destinasi wisata pantai serang.

Berjalanya kolaborasi dalam pengelolaan pantai tersebut, terjadi peningkatan pengunjung dari tahun 2017 sejumlah 17.733 orang di tahun 2018 sejumlah 59.179 orang. Retribusi masuk kawasan pantai naik semula Rp, 5000,- menjadi Rp, 7000,- dengan pembagian hasil 50% untuk Desa Serang sebagai pelaku wisata, 25% Pemerintah Kabupaten Blitar selaku regulator dan fasilitator, dan 25% untuk Perum Perhutani selaku pemilik lahan. More and Stephen (2012) mengemukakan, dalam proses kolaborasi perlu adanya inisiasi yang muncul guna terciptanya kolaborasi

agar dapat mengelola pantai serang secara maksimal yang semula terkendala oleh wilayah karena merupakan kawasan Perhutani. Dalam penerapannya Pemerintah Kabupaten Blitar dapat mengubah lahan hutan pantai yang kurang produktif mejadi lebih produktif.

Berdasarkan Berdasarkan hubungan kerjasama yang sudah di jalankan dalam pengelolaan pantai di Kabupaten Blitar tersebut, peneliti ingin menggali informasi mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam upaya pengelolaan destinasi wisata pantai Kabupaten Blitar. Dengan judul **“Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar)”**. Yang dikaji menggunakan teori dari Morse and Stephens (2012) proses *collaborative governance* melalui beberapa tahapan. Membagi tahapan *collaborative governance* ke dalam 4 tahapan, yaitu: *Assesment* (Penilaian), *Initiation* (Inisiasi), *Delibration* (Musyawarah), *Implementation* (Penerapan).

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah yang diambil yaitu bagaimana proses *Collaborative Governance* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dalam pengelolaan pariwisata pada sektor pantai di Kabupaten Blitar ?. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan memahami pelaksanaan *Collaborative Governance* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Desa Serang Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dalam pengelolaan pariwisata pada sektor pantai di Kabupaten Blitar.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian menggunakan proses *collaborative governance* menurut More and Stephens (2012) dengan menggunakan empat indikator di dalamnya, yaitu : 1). *Assasment* (Penilaian), 2). *Innitiation* (Inisiasi), 3). *Delebration* (Musyawarah), 4). *Implementation* (Penerapan). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Kemudian analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2015:337) yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian mengenai proses *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai Studi Pada Sinas Panriwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani KPH Blitar, Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar guna mengetahui proses *collaborasi* yang telah dilakukan, maka penelitian menggunakan indikator yang di ungkapkan oleh More and Stephens (2012) dengan empat indikator di dalamnya sebagai berikut :

1. *Assasment* (Penilaian)

Penilaian dilakukan oleh para *Stakeholders* melihat potensi yang dimiliki oleh destinasi wisata pantai serang dapat dikembangkan lebih jauh lagi, pesona alam maupun buatan yang dapat menarik wisatawan jauh lebih baik kedepannya. Adanya perselisihan diantara pemerintah dengan perhutani mengenai kewenangan lahan yang ada dilokasi destinasi wisata pantai. Pemerintah kabupaten blitar tidak bisa melakukan pengelolaan secara maksimal dikarenakan lahan yang ada di pantai serang juga masih dalam wilayah dari kerja perum perhutani yang juga memiliki kewenangan atas pengelolaan destinasi wisata pantai serang. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah dibutuhkan untuk kemajuan dari destinasi wisata pantai serang, pengelolaan lahan hutan tepi pantai yang juga harus mendapatkan ijin dari Perum Perhutani untuk dapat dijadikan lahan produktif guna memajukan destinasi wisata pantai serang. Masing masing pihak menyadari kurangnya kapasitas yang dimiliki oleh para *stakeholders* akan menghambat jalanya pengembangan potensi yang ada di wisata pantai serang sehingga masing masing *stakeholders* memerlukan sinergitas untuk mengelolan destinasi wisata pantai serang. Sejalan dengan pendapat (Imron Muhammad, 2020) Kerjasama kollaborative mulai dipupuk oleh berbagai pihak menimbulkan kesadaran akan saling membutuhkan dan saling terbuka dalam merefleksikan aspirasinya menjadi modal awal kerjasama kolaborative dilakukan.

Penilaian pada proses *collaborative governance* ini dapat dilihat dengan masing masing *stakeholders* memahami atas potensi yang dimiliki oleh wisata pantai serang. untuk dapat mengembangkan lebih bak lagi memerlukan kemampuan jaringan maupun sumber finansial yang baik, kesadaran masing masing *stakeholders* akan kekurangan masing masing untuk mengelola destinasi wisata pantai akan mengambat kemajuan destinasi wisata pantai serang, sehingga memerlukan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Desa untuk bisa mengembangkan desinasi wisata pantai serang lebih baik lagi.

2. *Innitiation* (Inisiasi)

Dalam proses *collaborative governance* inisiasi merupakan tahapan siapa yang menjadi inisiator dalam kolaborasi dan mengidentifikasi pihak mana saja yang berperan dalam kolaborasi sehingga dapat di sepakati bersama. Inisiasi terbangun oleh *stakholders* dalam mengatasi suatu hambatan yang telah terjadi guna mencapai tujuan yang hasil yang di inginkan More & Stephens (2012).

Innitiation (inisiasi) pada *collaborative* ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menggandeng Perum Perhutani dan Pemerintah Desa dalam mengelola destinasi wisata pantai dapat dirasa sesuai dengan kebutuhan dari masing masing pihak. Pemerinah kabupaten melakukan komunikasi dengan Perum Perhutani guna keberlangsungan pengelolaan destinasi wisata dengan melibatkan pihak pemerintah desa sebagai pengelola langsung atas destinasi wisata tersebut. Pihak perum perhutani dan juga pemerintah desa sangat merespon dengan baik dengan adanya inisiasi yang dilakukan oeh Pemerintah Kabupaten Blitar guna ppengelolaan destinasi wisata pantai tersbut. Dalam pengelolaan pariwisata yang mana dalam pengelolaan memerlukan sinergitas antar pemangku kepentingan yang memiliki peran tersendiri dalam pariwisata, tahapan inisiasi ini menentukan bahwa ketiga aktor tersebut yang telah memenuhi kebutuhan dalam *collaborative governance*, pihak perum perhutani selaku pemilik lahan yang nantinya akan menjadi fasilitator dalam pengadaan maupun penambahan lahan baru di lokasi wisata pantai, pemerintah desa selaku pengelola langsung yang akan memamanagement seluruh pengelolaan yang terjadi malai dari pelayanan hingga keamaan di lokasi destinasi wisata..

Menurut Ansell and Gash (2007) mengatakan bahwa suatu kerjasama dapat dikatakan *collaborative governance* ketika suatu kerjasama itu di inisiasi oleh lembaga publik. Pemerintah Kabupaten Blitar merupakan lembaga publik yang menjadi inisiator dalam kerjasama ini dengan demikian dapat dikatakan sebagai *collaborative governance*.

3. *Delebration* (Musyawarah)

Delebration atau musyawarah yang dilakukan oleh para *Stakeholders* membahas mengenai aturan dasar yang nantinya di sepakai dalam bentuk perjanjian kerjasama oleh ketiga pihak Antara Pemerintah Kabupaten Blitar Dengan Perum Perhutani Dan Pemerintah Desa untuk pengelolaan destinasi wisata pantai. Musyawarah yang dilakukan terlihat berjalan dengan baik yang dilakukan secara formal dan non formal oleh ketiga belah pihak, dengan menggunakan dialog langsung atau tatap muka maupun tak langsung dengan menggunakan via *phone* guna melancarkan

proses musyawarah yang dilakukan.

Tahapan musyawarah yang dilakukan melibatkan perangkat daerah yang lain untuk membantu dalam keberhasilan proses kerjasama pengelolaan pantai serang. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilibatkan seperti Bagian Hukum, BPKD, Dinas Pemdes, Dinas PU, BAPPEDA, Perhutani dan Pemerintah Desa sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan bertujuan untuk membantu prosesi keberlangsungan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Perum Perhutani KPH Blitar dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan destinasi wisata pantai. Proses musyawarah yang dilakukan ini terlihat adanya negoisasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* untuk menentukan beberapa point yang ada di dalam perjanjian kerjasama (PKS). Negoisasi tersebut berlangsung pada saat pembahasan mengenai pembagian hasil redistribusi dan kewajiban mencetak karcis masuk pada lokasi desinasi wisata, yang menjadi perdebatan adalah siapa yang akan berkewajiban untuk mencetak karcis retribusi tersebut. Konflik yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan usaha milik pemerintah antara lain berkaitan dengan pembagian keuntungan antar *shareholders*, keputusan kepada siapa pelayanan diberikan, konflik tentang pengawasan dan kewenangan-kewenangan lainnya (Ghosh & Whalley, 2008; Hoskisson, Hitt, Johnson, & Grossman, 2002.). sejalan dengan Jihansson (2010) dalam Kurniasaih, Denok, dkk. (2017) berpendapat peran negoisasi yang dilakukan oleh para *stakeholders* yang terlibat dalam suatu progam kebijakan publik akan sangat menentukan arah perubahan yang diharapkan oleh program tersebut. Adanya negoisasi didalamnya menemukan sebuah keputusan untuk pembagian hasil redistribusi Pemerintah Kabupaten Blitar 25%, Perum Perhutani 25% dan Pemerintaah Desa 50% dan percetakan karcis masuk diakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

Musyawarah yang dilakukan oleh ketiga pemangku kepentingan yaitu Pemerintah kabupaten Blitar, Perum Perhutani dan Pemerintah Desa merumuskan antara lain menentukan fokus dari masing masing aktor, Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki fokus sebagai fasilitator dan promosi yang dilihat kapasitas dari pemerintah kabupaten lebih memiliki konektifitas yang cukup tinggi akan lebih mudah untuk mengembangkannya. Perum Perhutani akan lebih fokus kepada fasilitas lahan yang ada di tepian pantai yang berpotensi untuk pengembangan di destinasi wisata pantai serang serta keprodukfian lahan hutan tepi pantai. Pengelolaan akan difokuskan kepada Pemerintah Desa Serang dimana pada pemerintah desa yang akan bersentuhan langsung dengan lokasi destinasi wisata pantai serang sehingga untuk penanganannya lebih optimal yang nanti akan dikordinasikan kepada pemerintah kabupaten maupun perhutani.

4. *Implementation* (Penerapan)

Implementation yang telah dilakukan terjadi sebuah penandatanganan perjanjiankerjasama oleh para *Stakeholders* menunjukkan pemahaman yang dapat disepakati bersama untuk melakukan sinergitas dalam pengembangan destinasi untuk mengelola destinasi wisata pantai tersebut. Mernurut cox (1985) dalam Pitana (2009) juga mengatakan memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan menghentikan aktifitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau aksestabilitas sosial walaupun disisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Masing masing pihak berusaha menjalankan program sesuai dengan tupoksinya yang telah dibuat. Pemerintah yang membangun sarana dan prasarana sesuai kapasitas yang dimiliki serta promosi yang telah menghasilkan wisata pantai serang dapat mengikuti beberapa event promosi. Akses jalan yang sudah dibangun, diadakanya pelatihan serta pendampingan terhadap sumber daya manusia pada pengelola destinasi wisata pantai serang yang memberikan pelayanan secara maksimal kepada para pengunjung memberikan kepuasan serta kepercayaan tersendiri bagi wisatawan.

Implementation ini menunjukkan ketiga aktor melakukan perannya dengan baik, pemerintah kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabuapten Blitar sebagai fasilitator dan juga mediator melakukan pembangunan fasilitas seperti jalan penerangan dan juga pengembangan terhadap SDM pengelola yang sangat menunjang keberhasilan pengelolaan destinasi wisata pantai serang. Perum Perhutani juga sebagai fasilitator juga melakukan perluasan lahan guna memenuhi kebutuhan fasilitas wisata seperti pengembangan lahan parkir yang dibutuhkan untuk menampung kendaraan para pengunjung. Pemerintah Desa Serang selaku pengelola dapat dengan baik menjalankan tugasnya sebagai pengelola dengan kordinasi dan bantuan dari pokdarwis sebagai SDM pengelolanya terdapat penambahan jasa usaha wisata baru yang berada di lokasi destinasi wisata menunjukkan tanggung jawab atas kolaborasi yang telah terjalin antara ketiga belah pihak.

Penerapan evaluasi yang dilakukan pada setiap tahunnya menjadi bahan untuk perpanjangan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Perum Perhutani dan Pemerintah Desa. Perubahan yang terjadi di lokasi wisata pantai serang menunjukkan bahwa dari ketiga aktor tersebut telah menjalankan peran masing masing dengan baik, sehingga kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Perhutani dan Pemerintah Desa dapat diperpanjang.

TEMUAN PENELITIAN

Pada penelitian terdapat perbedaan pendapat mengenai collaborative dilakukan dengan pihak mana saja, Pemerintah Kabupaten Blitar selaku inisiator mengusulkan kolaborasi dalam bentuk dua pihak antara Pemerintah Kabupaten dengan Perhutani. Pihak Perum perhutani mempunyai pendapat sendiri dengan mengusulkan pemerintah desa dilibatkan dalam perjanjian kerjasama dengan bentuk kolaborasi tiga pihak. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjelaskan Pemerintah desa merupakan bagian kewilayahan dari pemerintah daerah yang berimplikasi pada kewenangan desa untuk menjalankan kewenangan dari pemerintahan di atasnya. UU no 6 tahun 2014 pasal 9 mengenai kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki desa dalam bidang pembangunan desa untuk melakukan pengembangan ekonomi lokal desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan desa dapat melakukan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri diluar destinasi yang sudah masuk rencana pembangunan pemerintah kabupaten. Membuktikan penyelesaian persoalan mengenai bentuk kerjasama yang dilakukan telah menyepakati bentuk kerjasama dengan tiga pihak memberikan kepercayaan diri terhadap pemerintah desa untuk melakukan pengembangan terhadap destinasi wisata tanpa menunggu perintah dari pemerintah kabupaten.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata sektor pantai yang studi Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga dengan Perum Perhutani KPH Blitar dan Pemerintah Desa Serang menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dalam proses *collaborative governance* melibatkan para *stakeholders* yang terlibat untuk membantu dalam menyukseskan kolaborasi tersebut yang dilihat dari empat indikator menurut More and Stephens (2012) didalamnya. Adanya negosiasi yang dilakukan oleh para *Stakeholders* merupakan suatu hal yang dapat dijadikan sebuah langkah untuk menyamakan pemahaman antar *Stakeholders* dalam kolaborasi tersebut.

Hasil analisis proses collaborative governance dalam pengelolaan pariwisata sektor pantai studi pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Dengan Perum Perhutani Dan Pemerintah Desa Serang menunjukkan telah berjalan dengan baik dengan mengacu pada proses collaborative governance menurut more and stephens (2012) yang terdapat empat indikator yaitu : 1). Assament (Penilaian), 2). Inntiation (Inisiasi), 3). Delebration

(Musyawarah), 4). Implementation (penerapan). Proses *collaborative governance* pada indikator yang pertama yaitu *assasment* (penilaian) terlihat berjalan dengan baik. *Stakeholders* terlihat melakukan penilaian dengan melibatkan para aktor untuk menilai kondisi awal dari lokasi destinasi wisata pantai serang, yang menyimpulkan bahwa keberadaan potensi alam maupun buatan yang berada di pantai serang dapat di kembangkan lebih jauh lagi dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing masing aktor. Disini para *Stakeholders* mengakui atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masing masing aktor untuk bisa mengembangkan potensi yang ada sehingga perlunya tindakan untuk melakukan sinergitas lebih lanjut dalam mengelola destinasi wisata pantai serang.

Kedua, *innitiation* (inisiasi), pada tahap ini terlihat bahwasanya Pemerintah Kabupaten Blitar melakukan komunikasi dengan Perum Perhutani dan juga Pemerintah Desa untuk melakukan sinergitas guna mengembangkan destinasi wisata pantai serang, pada tahapan ini berjalan dengan baik dengan respon yang diberikan oleh Perum Perhutani dan juga Pemerintah Desa dalam menanggapi inisiasi yang akan dilakukan guna mengembangkan destinasi wisata pantai tersebut. Pada inisiasi ini juga dapat dikatakan sebagai *collaborative governance* untuk pihak yang melakukan inisiasi tersebut dari sektor lembaga publik.

Ketiga yaitu *delebration* (musyawarah), tahapan musyawarah yang telah dilakukan berjalan dengan lancar walaupun terjadi sebuah negoisasi yang dilakukan oleh para *stakeholder*, hal tersebut merupakan langkah untuk mencapai persamaan pandangan sehingga mendapatkan pemahaman bersama terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pantai serang dapat terselesaikan secara bersama. Pada tahapan musyawarah membahas mengenai aturan dasar kerjasama yang dilukan oleh para *stakeholders*, musyawarah dilakukan secara formal dan non formal dengan dialog langsung dan tidak langsung dengan menggunakan *telephone*. Hal tersebut sangat membantu dalam melancarkan proses musyawarah yang dilakukan guna membahan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh *stakeholders*

Tahapan yang ke empat yaitu implementation (penerapan). Tahapan ini merupakan sebuah tahap perancangan serta pelaksanaan dari proses kolaborasi dengan komponen komponen yang mendukung dari keberhasilan kolaborasi. *Stakeholders* tersebut saling berkomitmen dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan dan terselenggaranya kesepakatan untuk melakukan perjanjian kerjasama (PKS) oleh para *stakeholders*. Dengan keberhasilan dari indikator indikator diatas. Para *Stakeholders* secara bertahap telah melakukan sesuai dengan tanggung jawab. Pembangunan sarana prasarana maupun SDM telah

dilakukan secara bertahap oleh para *Stakeholders* yang di evaluasi setiap tahunnya, saat ini perjanjian kerjasama ini sudah diperpanjang pada tahun kedua. Dengan demikian proses kolaborasi ini berjalan dengan baik sehingga bisa menjadi solusi dari suatu permasalahan diawal mengenai tumpang tindih dalam pengelolaanya yang sekarang telah berjalan sesuai tugas dan kemampuan yang dimiliki.

SARAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian, maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi berlangsungnya proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata sektor pantai serang di Kabupaten Blitar. Berikut saran tersebut :

1. Pada proses *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata sektor pantai yang ada di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar yang dilaksanakan oleh Pemerintah kabupaten Blitar dengan Perum Perhutani KPH Blitar dan Pemerintah Desa Serang dapat dilakukan evaluasi secara bertahap untuk memastikan serta memonitoring pengembangan yang terjadi di pantai serang. Evaluasi dapat dilakukan pada setiap smester dengan melibatkan ketiga pihak antara Dinas pariwisata Kebudayaan Pemuda dan olahraga, Perum perhutani pemerintah desa serang beserta perwakilan dari pengelola ataupun pokdarwis agar bisa memaparkan kondisi terkerkini yang terjadi di pantai serang, sehingga dapat mengetahui tantangan kedepan yang akan di hadapi seperti apa. Menilai perjalanan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan awal dari kolaborasi dilakukan guna mempermudah dalam mengontrol perkembangan destinasi wisata tersebut. Dapat dijadikan bahan guna perpanjangan PKS dalam setiap tahunnya.
2. *Collaborative* ini diharapkan dapat menarik suatu peluang bisnis yang cukup menjanjikan dalam sektor pariwisata. Pada pengelolaanya kolaborasi ini bisa menggandeng para pihak yang dapat menunjang pengembangan pariwisata. Melibatkan sponsor guna melakukan investasi dapat melebarkan jangkauan untuk lebih dikenal oleh masyarakat luas yang tentunya akan berimbas pada peningkatan jumlah wisatwan yang masuk pada wisata pantai serang. Dengan menggandeng NGO yang bergerak dibidang pariwisata yang mengetahui strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pariwisata kedepanya, dengan menggandengan agen tour wisata akan semakin memperkenalkan destinasi wisata pantai serang yang dapat dikunjungi oleh wisatwan dari berbagai daerah. Dalam upaya memberikan pelayanan didaerah lokasi wisata pantai serang masih ditemukan belum adanya layanan tarik tunai dan pembayaran non tunai atau *cashless* yang mana akan menghambat perputaran uang yang dilakukan oleh para wisatwan dalam berbelanja di lokasi wisata. Untuk itu dapat menggandeng pihak perbankan maupun *e-commerce* untuk memenuhi hal tersebut.
3. Pada fasilitas umum, dengan adanya transportasi umum menuju lokasi wisata seperti bus maupun mini bus dapat memberikan pelayanan menuju ke lokasi destinasi wisata pantai serang. Adanya penginapan yang strategis untuk para wisatwan yang berkunjung dari luar daerah dapat menikmati bermalam di lokasi pantai tersebut sehingga sangat menunjang kemudahan untuk berwisata. Pemerintah kabupaten Blitar dapat mempertimbangkan hal tersebut guna pembangunan penginapan umum dan pengadaan transportasi umum yang akan memudahkan pengunjung mengakses lokasi pantai serang serta fasilitas penginapan untuk wisatwan agar semakin lama di tempat wisata pantai serang.
4. Pada lokasi desa serang tidak hanya terdapat destinasi wisata pantai serang yang dapat di kunjungi oleh para wisatwan, akan tetapi ada penagkaran penyu dan gua sejarah yang bisa dijadikan alternatif lainnya untuk berwisata. Melakukan sinergitas terkait pengelolaan destinasi wisata lain yang berada pada lokasi wilayah kerja perhutani dan desa serang, agar wisatwan yang berada di lokasi juga tertarik oleh destinasi wisata yang ada di desa serang, misalnya dengan kegiatan pada edukasi konservasi penyu, gua kedungkrombang yang menambah spot untuk berwisata di Desa Serang.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi pada penulisan jurnal penelitian ini, diantaranya:

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FIHS Unesa
2. Tjitjik Rahaju, S.Sos, M.Si. selaku dosen pembimbing
3. Indah Prabawati, S.Sos, M.Si. dan Fitrotun Niswah, S.AP, M.AP. selaku dosen penguji
4. pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan baik secara finansial maupun dukungan moral kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell. & Gash. *Collaborative Governance in Theory and Practice*. University of California, Berkeley
- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. *Quantum Learning*. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Elvirandini, Verinnathasia dan M.Farid Ma'ruf. 2018: *Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Perum Perhutani Dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Hutan (Studi Pada Program Paha Sylpi di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro)*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya
- Imron Muhammad, 2020, *Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan*, *Journal of public sector innovation*, vol. 4, no. 2.
- Jihansson (2010) dalam Kurniasaih, Denok, dkk. (2017). *Collaborative governance dalam penguatan kelembagaan program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat kabupaten banyumas*. *Jurnal Adimistrasi publik*. Vol. 19
- Kurniasaih Denok, 2017, *Kegagalan Bisnis Pemerintah Desa (Studi Tentang Relasi Bisnis-Pemerintah Pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas)*, *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, Vol. 1, No. 2,
- Mah, D. N.-y. & Hills, P., 2012. *Collaborative Governance for Sustainable Development: Wind Resource Assessment in Xinjiang and Guangdong Provinces, China*. *Sustainable Development Sust. Dev.* 20, Issue 10.I002/sd.466.
- Morse & John B, Stephens. 2012. *Teaching Collaborative Governance: Phases, Competencies, and Case-Based Learning*.
- Peraturan Daerah. No 4 tahun 2014. *Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021*.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparno. 2000. *Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah* dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah*. Malang: UM Press.
- UNESA. 2000. *Pedoman Penulisan Artikel Jurnal*, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Undang Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Pasal 9 Mengenai Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Undang Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan.
- Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Wahab, Abdul dan Lestari, Lies Amin. 1999. *Menulis Karya Ilmiah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Wahab, Salah. 2010. *Tourism Management*. London: Tourism International Press.
- Winardi, Gunawan. 2002. *Panduan Mempersiapkan Tulisan Ilmiah*. Bandung: Akatiga.